http://ejournal.uncen.id/index.php/JEB

Jurnal Ekologi Birokrasi

Volume 12 Nomor 1 2024

ISSN Print 2338-075X
ISSN Online 2654-7864

Implementasi Kebijakan pemberian Beasiswa Dana Otonomi Khusus bagi Mahasiswa Port Numbay Kota Jayapura

Rudolf Heli Kumbubui *, Agustinus Fatem, Vince Tebay, Yosephina Ohoiwutun

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia
**E-mail Korespondensi Penulis: oliskbi@yahoo.co.id*

ARTICLE INFO

Keywords:
Policy Implementation Model, Scholarship Program, Special Autonomy Fund, Higher Education, Government of Jayapura City

How to Cite:
Kumbubui R. H., Fatem A., Tebay V., Ohoiwutun Y. (2024). Model Implementasi Kebijakan pemberian Beasiswa Dana Otonomi Khusus bagi Mahasiswa Port Numbay Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(1): 61-81.

DOI:
10.31957/jeb.v12i1.3918

ABSTRACT

As an effort to advance Papuan human resources, the Special Autonomy Law regulates education and culture. One form of concern for the future of Papuan human resources, especially attention in the education sector, was also shown by the Jayapura City Government through the Port Numbay Men's Special Education Program (PKP3N) in collaboration with the Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. The provision of scholarships through PKP3N since 2013 until now has shown a fairly good performance despite the challenges and obstacles faced. This sociological condition in the field of Higher Education does not have to be a prolonged problem, but a solution must be sought. Therefore, it is necessary to create a model that is considered appropriate in answering various problems of higher education within the Jayapura City Government. Specifically, the purpose of this research is to explain the implementation of the policy of the scholarship award in the Higher Education Sector implemented by the Jayapura City Government, identify the factors that support and hinder the process of implementing the policy of the scholarship award in the Higher Education Sector for Port Numbay students. at UKSW Salatiga, and strategically evaluating the success of implementing the Special Autonomy Fund scholarship award for the Higher Education Sector within the Jayapura City Government. This study was designed with a qualitative method. Data was collected through structured interviews with policy makers (Jayapura City Government and Jayapura City Regional Secretary) and policy recipients (19 students of UKSW Salatiga). Unstructured interviews were also addressed to policy implementers and several community members. The findings of this study mainly focus on the need for socialization to executive officials, Technical OPD and Community Leaders as well as a form of attention and motivation to policy recipients as a form of follow-up for the success of policy implementation.

Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Model Implementasi Kebijakan, Otonomi Khusus Papua, Pemberian Beasiswa, Dana Otonomi Khusus Pendidikan Tinggi, Pemerintah Kota Jayapura

Cara Mengutip:
Kumbubui R. H., Fatem A., Tebay V., Ohoiwutun Y. (2024). Model Implementasi Kebijakan pemberian Beasiswa Dana Otonomi Khusus bagi Mahasiswa Port Numbay Kota Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(1): 61-81.

DOI:
10.31957/jeb.v12i1.3918

ABSTRAK

Sebagai upaya memajukan SDM Papua, UU Otsus mengatur perihal pendidikan dan kebudayaan. Salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan SDM Papua khususnya perhatian dalam bidang pendidikan juga ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura melalui Program Pendidikan Khusus Putra-Putri Port Numbay (PKP3N) bekerja sama dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Pemberian beasiswa melalui PKP3N sejak tahun 2013 hingga saat ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik di samping masih adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi. Kondisi sosiologis di bidang Pendidikan Tinggi ini tidak harus menjadi problematika yang berkepanjangan, melainkan harus dicari solusinya. Oleh karena itu, harus tercipta suatu model yang dipandang tepat dalam menjawab berbagai permasalahan pendidikan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus di Bidang Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus di Bidang Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa Port Numbay di UKSW Salatiga, dan mengevaluasi secara strategis keberhasilan implementasi kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus Bidang Pendidikan Tinggi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Jayapura. Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur terhadap para penyusun kebijakan (Pemerintah Kota Jayapura dan Sekretaris Daerah Kota Jayapura) dan penerima kebijakan (19 mahasiswa UKSW Salatiga Angkatan Tahun 2017). Wawancara tidak terstruktur juga ditujukan kepada pelaksana kebijakan dan beberapa anggota masyarakat. Temuan penelitian ini terutama pada perlunya dilakukan sosialisasi terhadap para pejabat eksekutif, OPD Teknis dan Tokoh Masyarakat serta bentuk perhatian dan motivasi kepada para penerima kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut untuk keberhasilan implementasi kebijakan.

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Papua diberikan otonomi khusus merupakan salah satu bentuk kompromi politik yang diberikan bangsa Indonesia terhadap keinginan untuk melepaskan diri dari Bangsa Indonesia (Ramandey, dkk, 2005: 160). Proses penerapan Undang-undang Otsus bagi Provinsi Papua sejak ditetapkan memang rumit dan berliku. Meskipun dana yang digelontarkan besar, namun pelaksanaan Otsus Papua masih menghadapi tantangan dan permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya pemekaran Provinsi Papua yang tidak terkendali, rendahnya kapasitas aparat pelaksana daerah dan tidak konsistennya pemerintah pusat serta maraknya korupsi (Ramandey, dkk, 2005; 163-168) Sejalan dengan perubahan pendidikan di berbagai jenjang yang semakin

kompetitif, maka tidaklah heran kondisi ini turut menyita perhatian dari berbagai pihak untuk menata secara khusus masalah bidang pendidikan tinggi agar selalu menjadi baik. Fenomena ini tampaknya juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura dengan memberikan ruang tersendiri pada bidang pendidikan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur pendidikan sebagai hak konstitusional bagi setiap warganya sekaligus menjadi kewajiban konstitusional bagi negara. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban konstitusional tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan merupakan salah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia yang tecermin dalam Alinea Pembukaan UUD RI 1945 yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa". Pendidikan juga diatur secara tersendiri dalam UUD RI 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) serta Bab XII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31. Amanat konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagaimana telah diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan UU Sisdiknas memuat penyelenggaraan pendidikan secara berjenjang mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi berdasarkan pada Pasal 24 UU Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi masih dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan nilai-nilai kebijakan. Namun, kondisi perguruan tinggi di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai masalah sekaligus menjadi masalah bangsa Indonesia terkait dengan hak konstitusional dan tanggung jawab Negara dalam pendidikan. Selain kebijakan pendidikan secara nasional yang diatur dalam UUD RI 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) serta Bab XII tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai upaya memajukan SDM Papua, UU Otsus juga mengatur perihal pendidikan dan kebudayaan dalam Pasal 56, yaitu: (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua; (2) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi; (3) Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya; (4) Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua; (5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan. Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua (PERDASI Papua).

Salah satu bentuk proteksi yang dilakukan Lembaga Kultur Majelis Rakyat Papua, adalah dengan mendorong lahirnya tiga produk PERDASUS yakni (1) PERDASUS Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan untuk Kekayaan Intelektual

Orang Asli Papua; (2) PERDASUS Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan (3) PERDASUS Papua Nomor 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi komunitas Adat Terpencil. PERDASUS Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan bahwa: (1) UU Otsus Papua memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pendidikan pada semua jenis, jalur dan jenjang di Provinsi Papua; (2) penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua sebagai sub sistem dari sistem Pendidikan Nasional, dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua belum mengakomodir penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik budaya dan geografis di Provinsi Papua sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan. PERDASUS Papua Nomor 3 tahun 2013 tentang "Pelayanan Pendidikan Bagi komunitas Adat Terpencil", adalah sebagai berikut;

1. pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan bagi penduduk Papua sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia, dengan memberikan prioritas kepada orang asli Papua, secara khusus peserta didik di daerah-daerah yang terisolasi, terpencil dan terabaikan;
2. pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan untuk memeratakan dan meningkatkan mutu di setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan dengan memberikan prioritas kepada perbaikan mutu pendidikan dasar;
3. pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat adat dan perempuan;
4. pendidikan di Provinsi Papua diselenggarakan selaras dengan beban masyarakat serendah-rendahnya sampai dengan jenjang sekolah menengah;
5. pendidikan di Provinsi Papua menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta dilaksanakan secara sistemik dan terbuka.

Di tingkat daerah seperti Papua hingga saat ini, masih terdapat berbagai kekurangan dalam SDM dan infrastruktur pendidikan yang belum tertata baik pemanfaatannya. Diberlakukannya UU Otsus Papua merupakan sebuah esensi penting dalam mengubah seluruh tatanan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Papua, termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan.

Lambatnya perkembangan SDM di Papua selama diberlakukannya UU Otsus disebabkan ketidakpastian akan pemahaman dalam mengelola SDM itu sendiri. Pelaksanaan Otsus hingga saat ini belum menampakkan hasil yang menggaungkan nama Papua di kancah dunia. Padahal bila evaluasi Otsus rutin dilakukan setiap tahun atau periode tertentu bila kita rutin melakukan evaluasi Otsus disetiap tahun atau periode tertentu selama diperlakukan Otsus maka anak-anak Papua akan menjadi aset intelektual yang dapat dipakai kemampuannya di kanca Nasional, Asia, Eropa dan juga diberbagai belahan negara lainnya di dunia. Hal-hal inilah yang semestinya mendapat perhatian khusus, namun kita telah terlena dengan Otsus yang identik dengan Uang.

Semestinya ketika diberlakukan Otsus bagi Tanah Papua, maka langkah memetahkan setiap SDM anak-anak Papua adalah menjadi penting untuk menjawab berbagai tantangan ketika Otsus akan berakhir. Namun kita tidak perlu merasa cemas dan khawatir karena pemerintah pusat selalu menaruh perhatian penuh terhadap semua proses pembangunan yang terjadi di seluruh Tanah Papua. Memang membangun Orang Papua dan Tanah Papua adalah sebuah keniscaan yang sulit. Namun dalam

dirinya orang Papua yang kuat dan cerdas adalah untuk membangun dirinya harus melewati berbagai proses yang terukur sehingga kemajuan yang diharapkanpun tercapai, ini adalah bagian dari impian sejahtera Orang Papua Asli. Hal-hal inilah yang dapat dimanfaatkan selama diberlakukannya Otsus bagi Provinsi Papua.

Prinsip-prinsip dasar pendidikan tersebut merupakan penegasan dari UU Otsus sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kebijakan khusus (*affirmative action policy*) bagi penduduk asli Papua dalam beberapa bidang kehidupan yang penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Kebijakan *affirmative action* sebagai bagian integral dari Indonesia tentang memperoleh jaminan konstitusional sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan". Kebijakan *affirmative action* sebenarnya merupakan bentuk tindakan diskriminasi sementara yang bertujuan positif dan diperlukan untuk mengatasi fakta adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat, sehingga secara khusus tujuannya adalah untuk mencapai persamaan dan keadilan. Sebagai konsekuensi logisnya, pelaksanaan kebijakan tersebut harus dihentikan setelah tujuan atau sasaran yang ditargetkan tercapai.

Kebijakan *affirmative action* perlu diwujudkan dalam bentuk terobosan kebijakan kreatif yang dibangun dalam konstruksi hukum yang tepat dan diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk mengatasi kendala di bidang penyelenggaraan pendidikan yang dialami daerah-daerah di Provinsi Papua yang memiliki wilayah terpencil dengan kesulitan akses komunikasi, informasi dan transportasi dengan sebagian besar penduduknya adalah orang asli Papua dan memiliki hukum adat sebagai suatu kekuatan yang signifikan. Kebijakan *affirmative action* tersebut pada hakekatnya adalah bentuk penjabaran dari amanat Pasal 56 dan Pasal 66 Undang-Undang 21 Tahun 2001 melalui pembentukan perangkat hukum yang mengatur cara pelayanan pendidikan yang tepat sasaran bagi masyarakat Papua di wilayah terpencil dan terabaikan.

Di era otonomi khusus Papua, terdapat juga geliat dalam mendorong pertumbuhan pendidikan melalui *affirmative action*. Salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan SDM Papua khususnya perhatian dalam bidang pendidikan juga ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, M.M., sejak periode pertama kepemimpinannya (2011-2016) hingga sekarang (2017-2022) telah mencatat sejumlah kebijakan antara lain dengan menyisihkan anggaran yang bersumber dari Dana Otsus demi membangun SDM yang berkualitas. Kemudian diperkuat melalui program *"Affirmative Action"* bagi anak-anak yang mempunyai tanah, air dan negeri ini, hingga pada tahun 2013, tercetuslah Program Pendidikan Khusus Putra-Putri Port Numbay (PKP3N) bekerja sama dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah. Bentuknya yaitu pemberian bantuan beasiswa dan seleksi khusus untuk melanjutkan pendidikan di USKW Salatiga, serta membangun asrama mahasiswa Port Numbay di Salatiga. Bahkan hingga saat ini sudah ada yang melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 dan S3 di luar negeri (Dharapos.com, 2018).

Banyak pihak yang telah mengapresiasi PKP3N ini, antara lain Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Prof. Drs. John A. Titaley, Th.D., seperti yang dilansir dalam siaran pers Humas Setda Kota Jayapura (19 Oktober 2017), bahwa para mahasiswa PKP3N di UKSW Salatiga telah menunjukkan prestasi baik di bidang akademik, olah raga, seni, penalaran dan moral keagamaan. Sementara Ketua

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Arnold Awi, seperti yang dilansir dalam siaran pers Humas Setda Kota Jayapura (27 Maret 2017) menilai bahwa Pemerintah Daerah Kota Jayapura telah berhasil melaksanakan program tersebut dan berharap tetap mempertahankannya sehingga peningkatan SDM Papua tetap berjalan secara berkelanjutan. Sejak awal PKP3N sudah mengalami banyak tantangan dan hambatan. Meskipun demikian, Dr. Benhur Tomi Mano, M.M., sebagai perintis mengatakan bahwa program ini berjalan dengan satu tekad, yaitu hasil yang didapat harus menjadi berkat bagi semua orang (Dharapospapua.com, 2017). PKP3N juga mendapatkan banyak apresiasi dari para mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati program ini.

Tabel 1 Status Mahasiswa Port Numbay di UKSW Salatiga Angkatan Tahun 2013-2017

Keterangan	Tahun Angkatan					Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	
Aktif	8	4	25	29	30	**96**
Wisuda	8	3	0	0	0	**11**
Indisipliner / D.O.	24	18	5	1	0	**48**
Jumlah	**40**	**25**	**30**	**30**	**30**	**155**

Sumber: Sistem Informasi Akademik UKSW Salatiga

Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat diketahui status mahasiswa Port Numbay di USKW Salatiga pada tahun angkatan 2013-2017. Pada awal program PKP3N ini diadakan pada tahun 2013, ternyata banyak mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena indisipliner atau *drop out* (D.O.). Namun secara keseluruhan, jumlah mahasiswa aktif terjadi peningkatan sedangkan jumlah mahasiswa indisipliner / *drop out* mengalami penurunan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi alasan mahasiswa untuk memutuskan berhenti atau tetap bertahan melanjutkan pendidikannya.

Apabila melihat kehidupan mahasiswa Port Numbay di UKSW Salatiga tidak terlepas dari beragam fenomena sosial-budaya yang juga menjadi tantangan dan hambatan implementasi program PKP3N. Dari segi akademik, salah satu kendala yang dialami adalah masalah bahasa dan budaya (Sibi, 2018). Sementara dari segi non-akademik, ditunjukkan dengan perilaku interaksi sosial. Mahasiswa asli Papua melakukan interaksi sosial lebih banyak dengan mahasiswa etnis Sumba dan etnis Jawa. Pola interaksi sosial asosiatif dan disosiatif terjadi antara mahasiswa asli Papua dengan mahasiswa etnis Sumba. Sedangkan pola interaksi disosiatif cenderung terjadi pada mahasiswa etnis Papua dengan mahasiswa etnis Jawa. Pola interaksi tersebut diungkapkan melalui tindakan/perilaku sosial maupun secara simbolik berkaitan dengan konsep pikiran (tertutup), konsep diri (respons) dan konsep sosial (pengaruh luar atau lingkungan). Pola interaksi asosiatif terlihat dari kebiasaan mereka berkumpul bersama untuk bermain, mengerjakan tugas kuliah dan saling membantu kesulitan teman. Sedangkan pola interaksi disosiatif terwujud dalam bentuk konflik, seperti tawuran, pengeroyokan yang disebabkan oleh kondisi mabuk dan berdampak pada bentuk penolakan (Apyaka, 2016; Mustikawaty, 2016).

Penelitian Tumonggi (2017) juga mengungkapkan hasil yang sama. Sebagai pelajar yang datang dengan latar belakang budaya berbeda dan berada di lingkungan sosial yang baru dan juga terdiri dari berbagai kebudayaan lainnya, diperlukan kemampuan beradaptasi yang baik untuk masing-masing individu dalam melewati tahapan adaptasi untuk dapat menerima keadaan lingkungan. Interaksi dan adaptasi para pelajar asal Papua di Salatiga mengalami pasang surut atau dinamika proses interaksi dan adaptasi. Pasang surut terjadi karena latar belakang budaya yang sangat berbeda dengan kehidupan budaya masyarakat Salatiga. Keberhasilan interaksi dan adaptasi siswa asal Papua di Salatiga dapat dilihat dari penyesuaian unsur-unsur budaya seperti bahasa, makanan, dan sistem kekerabatan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan teman-teman di sekolah. Keberhasilan pelajar asal Papua dalam melewati setiap fase adaptasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi maupun faktor simpati.

Hasil penelitian Asi (2016) menunjukkan bahwa ada perbedaan stres akulturatif pada mahasiswa Papua di UKSW Salatiga ditinjau dari jenis kelamin. Ternyata mahasiswa Papua laki-laki memiliki stres akulturatif lebih tinggi dibandingkan mahasiswa Papua perempuan. Selain itu, ada pengaruh simultan dari *hardiness* (ketahanan) dan dukungan sosial terhadap stres akulturatif pada mahasiswa Papua di UKSW Salatiga. Penelitian Soumilena (2017) tidak menemukan adanya hubungan antara konsep diri dengan stres akademik pada mahasiswa Papua pengguna alkohol di UKSW Salatiga. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan semangat belajar mahasiswa Papua di UKSW Salatiga adalah dibangunnya jejaring sosial di mana terdapat aktor-aktor yang memiliki peran sentral dalam penyebaran informasi perkuliahan, tugas hingga persiapan tes (Kapisa, 2014). Namun dalam hal unjuk prestasi, Saflessa (2016) menemukan bahwa konsep diri dan pembelajaran mandiri tidak signifikan berpengaruh terhadap motivasi berprestasi mahasiswa Papua di UKSW Salatiga. Sebaliknya, Pattinama (2017) menunjukkan bahwa pola asuh otoritatif signifikan berpengaruh terhadap motivasi berprestasi pada mahasiswa Papua di UKSW Salatiga. Ini juga ditunjukkan dari hasil penelitian Yulianti (2019) bahwa dukungan sosial signifikan berpengaruh terhadap adaptasi sosiokultural mahasiswa Papua di UKSW Salatiga. Pemberian beasiswa melalui program PKP3N sejak tahun 2013 hingga saat ini telah menunjukkan kinerja yang cukup baik di samping masih adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi. Masih banyak masyarakat yang belum dan berkesempatan merasakan manfaat program pendidikan ini, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat non-Papua pada masa yang akan datang (Humas Setda Kota Jayapura, 27 Maret 2017).

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua isu utama yang menjadi perhatian di Tanah Papua. Meskipun telah dilakukan proteksi bidang pendidikan terhadap anak-anak asli Port Numbay dalam mengenyam pendidikan di UKSW Salatiga, namun pada kenyataannya program ini masih menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Port Numbay dan bukan Port Numbay lainnya. Dari pengamatan awal pada sebagian masyarakat yang ditemui, mereka berpendapat bahwa seharusnya beasiswa diberikan merata ke semua anak-anak Port Numbay dan non- Port Numbay yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Namun kenyataannya, pemberian beasiswa ini lebih cenderung ke mereka yang ada di sekitar “pejabat pelaksana kebijakan” (EW, 2017).

Kondisi sosiologis di bidang Pendidikan Tinggi ini tidak harus menjadi problematika yang berkepanjangan, melainkan harus dicari solusinya. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dimaksud, maka harus tercipta

suatu model yang dipandang tepat dalam menjawab berbagai permasalahan pendidikan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Konsep secara teoretis adalah Konsep dan aplikasi tentang Implementasi kebijakan publik di Indonesia menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:168) yang menyatakan bahwa Implementasi adalah suatu kebijakan memperoleh hasil yang optimal, maka masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, perlu memperoleh informasi yang memadai tentang kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut. Silo (2011:66) mengemukakan bahwa Implementasi Strategi Pelayanan Pendidikan memiliki relevansi dan koherensi kajian dimensi-dimensi strategi dengan model *coungruen* dari Thompson. Model tersebut, menjelaskan konfigurasi empat wajah yang mungkin akan terjadi, yaitu : *Pertama*, apabila faktor nilai-nilai organisasi tidak turut dipertimbangkan sebagai faktor determinan, maka akan menimbulkan kekacauan terhadap kompetensi organisasi; *kedua*, manakala organisasi mengabaikan pentingnya faktor sumberdaya, maka organisasi tidak memiliki kompetensi, *Ketiga*, ketika faktor lingkungan tidak menjadi bagian penting dalam strategi organisasi, maka sulit merumuskan strategi pengembangan; *Keempat*, apabila faktor lingkungan, nilai-nilai, dan sumberdaya tidak terkait satu sama lain, maka organisasi tersebut akan bangkrut dan kehilangan maknanya.

Sesuai dengan tujuannya, kebijakan publik dirancang dan dibuat untuk mengatasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Masalah publik yang sudah masuk dalam agenda pemerintah untuk dipecahkan kemudian akan berubah menjadi masalah kebijakan, yaitu masalah yang menuntut pemerintah untuk secara serius mencarikan solusinya. Menurut Nugroho (2018:1), kegagalan kebijakan publik di masa orde baru karena tidak melibatkan ‘publik’ itu sendiri. Sejalan dengan amanat UU Otsus, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik menurut filosofi *good governance* seharusnya mengedepankan prinsip transparansi atau keterbukaan, yang berarti tidak saja mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah (Tahir, 2014:125-127). Prinsip *good governance* paling tidak mencerminkan karakteristik yakni: partisipatif, keadilan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan umum, kesamarataan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi yang strategis (Nugroho, 2018:3-4; Utomo, 2006 :186).

Berdasarkan pada fenomena masalah tersebut di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji implementasi kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus yang telah dilaksanakan selama ini, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program dan selanjutnya merumuskan strategi keberhasilan implementasi kebijakan program. Penelitian ini dilaksanakan dengan judul: “Model Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Dana Otonomi Khusus di Bidang Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Port Numbay oleh Pemerintah Kota Jayapura.” Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu refleksi dalam peningkatan pembangunan SDM dan menjadi parameter bagi pembangunan Pendidikan Tinggi di tingkat kabupaten/kota lainnya di seluruh tanah Papua.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Dalam penelitian kualitatif, gagasannya adalah bahwa

peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomenon dalam suatu keadaan alamiah (Moleong, 2005: 26). Sebagaimana yang menjadi kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu untuk menghasilkan rekomendasi model implementasi kebijakan pemberian beasiswa Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Tinggi Mahasiswa Port Numbay di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Lokasi Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yakni, Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, Lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Fokus penelitian ini secara khusus adalah untuk (1) menjelaskan implementasi kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus di Bidang Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus di Bidang Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa Port Numbay di UKSW Salatiga; dan (3) mengevaluasi secara strategis keberhasilan implementasi kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus Bidang Pendidikan Tinggi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Jayapura.

Fokus penelitian ini mencakup dua tataran perhatian. Pertama, tataran kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan regulasi dalam konteks *good governance* pada pemberian beasiswa yang bersumber dari Dana Otsus Bidang Pendidikan Tinggi. Unsur-unsur yang termasuk dalam tataran ini yaitu prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura serta pihak-pihak terkait sebagai penyelenggara kebijakan serta konstruksi dan rekonstruksi dari mekanisme penyelenggaraan dari sisi kebijakan, peraturan perundang-undangan dan regulasi. Kedua, tataran empiris tentang peran dan kapasitas publik terhadap kebijakan program, khususnya hubungan antara Pemerintah Daerah, Dinas terkait, tokoh masyarakat, orang tua, dan mahasiswa penerima pemberian beasiswa. Hal ini mencakup pula bagaimana publik menilai penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, mekanisme kebijakan serta tujuan yang diharapkan. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan program khususnya dilihat dari pelaksanaan standar proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya di bidang Pendidikan Tinggi. Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini, dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber Data	Sumber Informasi	Pengumpulan Data
Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan kebijakan	Wali Kota Jayapura	Wawancara terstruktur
	Sekretaris Daerah Kota Jayapura	Wawancara terstruktur
Pelaksana kebijakan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wawancara tidak terstruktur
	Mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah	Wawancara tidak terstruktur
	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	Wawancara tidak terstruktur
Penerima kebijakan		Wawancara kelompok fokus

Sumber Data	Sumber Informasi	Pengumpulan Data
	Mahasiswa PKP3N Angkatan Tahun 2017 di UKSW Salatiga	Wawancara terstruktur (perorangan)
Publik (masyarakat)	2 anggota masyarakat/ warga dalam tataran empiris.	Wawancara tidak terstruktur
Landasan kebijakan	Kebijakan, peraturan perundang-undangan, regulasi	Dokumentasi
Proses dan hasil kebijakan	Kondisi di lapangan	Catatan lapangan
Dokumen terkait	Laporan akademik dan pengelolaan keuangan	Dokumen

Adapun teknik pengumpulannya, data untuk penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, pengamatan dan penelusuran dokumen. Teknik wawancara yang digunakan teknik wawancara terbagi atas wawancara kelompok fokus, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara kelompok fokus (Moleong, 2005:226) dilakukan dengan tanya-jawab secara langsung kepada kelompok mahasiswa PKP3N Angktan Tahun 2017 di UKSW Salatiga. Selain itu, wawancara terstruktur juga dilakukan untuk masing-masing mahasiswa secara perorangan. Wawancara terstruktur juga ditujukan kepada pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. Sementara wawancara tidak terstruktur ditujukan kepada para pelaksana kebijakan serta perwakilan masyarakat (publik) sebagai evaluator kebijakan program. Teknik pengamatan Adapun yang menjadi fokus dalam pengamatan penelitian ini dengan melakukan catatan lapangan atas fenomena perubahan yang terjadi pada dua tahapan, pertama proses awal pemberian pemberian beasiswa Dana Otsus Bidang Pendidikan Tinggi oleh Pemerintah Kota Jayapura. kedua, proses akhir dari pencairan Dana Otsus untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa Port Numbay di UKSW Salatiga. Penelusuran dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, dan aturan suatu lembaga masyarakat. Dokumen internal selain peraturan perundang-undangan dan regulasi, juga termasuk laporan keuangan dan akademik terkait pemberian beasiswa Dana Otsus bagi mahasiswa Port Numbay di UKSW Salatiga. Sementara dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi berupa majalah, buletin, pernyataan, dan berita media massa. Dalam penelitian ini, dokumen eksternal diperoleh dari artikel jurnal, buku-buku teks, majalah dan berita baik berbentuk cetak maupun bersumber dari internet.

Penelitian ini mengadaptasi model analisis data Glaser & Strauss dalam Moleong (2005:288-289) yang disebut metode perbandingan tetap dengan langkah-langkah, yakni tahapan *pertama* Reduksi data mengidentifikasi satuan (unit) yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Tahapan *kedua* Kategorisasi, upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Tahap *ketiga* Sintesisasi, Mensintesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Tahap *keempat*, Menyusun hipotesis kerja (proposisi), Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara merumuskan suatu pernyataan

yang proporsional. Hipotesis kerja merupakan teori substantif (berasal dan masih terkait dengan data). Hipotesis kerja terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Tinggi oleh Pemerintah Kota Jayapura

Pada masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., sejak periode kepemimpinan pertama (2011-2016) telah memberikan terobosan dengan melakukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. dengan mengirim sekitar 30 sampai 40 mahasiswa asli asal Port Numbay, baik putra maupun putri untuk bisa menimba ilmu sebanyak mungkin dengan harapan dapat menghasilkan SDM anak-anak asli Port Numbay yang andal bagi Kota Jayapura dan juga untuk daerah lainnya di seluruh Tanah Papua dan Indonesia pada umumnya.

Pesatnya kemajuan pembangunan di suatu daerah, sangat di tentukan pula juga dengan seberapa besar Sumber Daya Manusia, guna bisa menjawab berbagai permasalahan sosial yang ada termasuk masalah di bidang pendidikan, yang menurut hemat peneliti, dapat memberi dampak positif terhadap dinamika kemajuan pendidikan yang kerap terjadi. Konsekwensi logis ini juga tengah di genjot pemerintah Kota Jayapura dengan memberikan akses mobilitas pelayanan pemerintah dengan berbagai terobosan guna mematang semua akses pelayanan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kepada semua lapisan masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Jayapura-Provinsi Papua.

Adalah sebuah keniscayaan bila sebuah bentuk proteksi yang berimplikasi baik tidak memhasilkan sesuatu, justru sangatlah tepat dengan gebrakan pembangunan yang dilakukan Wali Kota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M., dengan melakukan proteksi khusus kepada anak-anak asli Port Numbay, dengan mengikutsertakan mereka dalam seleksi, lulus dan diterima serta bisa dapat kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana dengan mengirim sekitar 91 orang mahasiswa asal Port Numbay sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang hingga kini masih merupakan lanjutan program bantuan beasiswa bagi anak-anak Port Numbay.

Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan Sekretaris daerah Dr. Frans Pekey, M.Si., dalam rangkuman 13 pertanyaan, menjelaskan bahwa program ini sangat berimplikasi dalam merubah derajat hidup generasi muda Port Numbay, masa kini dan dimasa mendatang. Namun ada yang sangat berbedah dan jauh dari harapan program ini adalah komentar tulus yang dikemukakan oleh 19 mahasiswa dari 40 mahasiswi Port Numbay yang direkrut dalam Program Khusus Putra dan Putri Port Numbay, (PKP3N) Kota Jayapura tahun 2017, yang menyatakan bahwa program ini memang baik, namun membutuhkan empat hal penting demi berkesinambungannya program bantuan beasiswa bagi anak-anak Port Numbay, yang jauh lebih baik, yakni;

1. Program ini membutuhkan transparansi yang benar-benar pro mahasiswa dan pro rakyat Port Numbay,
2. Harus ada tim seleksi yang prosedural,
3. Harus ada orang tua asrama yang jelas,
4. Harus ada ASN yang ditempatkan untuk bisa memberikan analisis sebelum dan sesudah terjadinya problema yang dapat mengganggu program PKP3N pemerintah Kota Jayapura,

5. Pejabat yang bekerja di bagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang ditempatkan mengurus program PKP3N dinilai lambat meresponi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa.

Pemerintah Kota Jayapura, dimasa kepemimpinan Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. tidak hanya menyiapkan SDM anak-anak Port Numbay melalui program khusus pemberian bantuan beasiswa, namun menyiapkan lapangan pekerjaan bagi anak-anak penerima pemberian beasiswa ini adalah sesuatu yang mutlak dilakukan, misalnya untuk mereka yang lulus melalui program bantuan beasiswa khusus, selepas mereka wisuda, mereka disiapkan lapangan pekerjaan, dengan menempatkan mereka di 14 kampung yang berada di pemerintah Kota Jayapura dan juga yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Jayapura da nada pula yang di orbitkan sebagai karyawan swasta pada Badan Usaha Miliki Negara, seperti beberapa bank di Jayapura. Namun ada pendapat lain yang sedikit berbeda, seperti yang dikemukakan oleh mahasiswa yang mengikuti program PKP3N berinisial MM bahwa; "Menurut saya, memang harus kembali bekerja di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Karena pemerintah akan rugi jika kita nanti bekerja di tempat lain. karena pendidikan yang kami dapat sebelum bekerja dibiayai oleh pemerintah Kota Jayapura." Apa yang dikemukakan oleh mahasiswa Port Numbay berinisial MM, setidaknya menjadi perhatian serius pemerintah Kota Jayapura, agar bisa memberdayakan anak-anak asli Port Numbay di dilingkungan pemerintahan agar mereka bisa mengaplikasikan disiplin ilmunya secara khusus dalam hal pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga publik tidak salah menjastifikasi keberadaan program PKP3N yang berimplikasi posistif terhadap kemajuan SDM anak-anak Port Numbay asal Kota Jayapura.

Pihak-pihak yang kepentingannya terpengaruh dengan konten kebijakan utamanya adalah mahasiswa Port Numbay sebagai penerima pemberian beasiswa. Namun sesuai dengan jenisnya yaitu pemberian beasiswa yang berasal dari Dana Otonomi Khusus di Bidang Pendidikan Tinggi, maka pihak-pihak yang juga ikut terpengaruh adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan program dan masyarakat asli Papua khususnya yang tinggal di Kota Jayapura. PKP3N (Program Khusus Putra-Putri Port Numbay) merupakan salah satu program afirmasi di bidang pendidikan sebagai upaya dari Pemerintah Daerah Kota Jayapura untuk memajukan kualitas dan kuantitas SDM. Pada awalnya, program ini mengundang polemik di kalangan masyarakat asli Papua karena adanya kecenderungan eksklusivitas.

Jenis manfaat yang dihasilkan adalah salah satu unsur penting dalam sebuah konten kebijakan. Sejak awal program ini digulirkan hingga saat ini masih banyak pihak yang meragukan manfaat dari PKP3N terutama bagi pembangunan di Tanah Papua. Derajat perubahan yang diinginkan dapat dikatakan pula sebagai ukuran sejauh mana suatu kebijakan dapat mengatasi suatu persoalan publik. Sejak awal program ini digagas pada tahun 2013, PKP3N (Program Khusus Putra-Putri Port Numbay) memang diharapkan untuk memajukan kualitas SDM di Kota Jayapura. Ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pemberian beasiswa melalui PKP3N telah berjalan dari tahun 2013 hingga 2019 pada saat penelitian ini dilakukan. Pada awalnya, program ini mendapatkan banyak pertentangan di berbagai kalangan masyarakat. Apalagi hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan awal. Sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.4

berikut, mahasiswa yang *Drop Out* (D.O) atau indisipliner pada periode tahun pertama cukup banyak, yaitu sebanyak 23 orang. Jumlahnya lebih dari setengah dari total mahasiswa yang pertama kali mendapatkan pemberian beasiswa.

Tabel 3. Data Mahasiswa PKP3N Kota Jayapura di UKSW

Angkatan	D.O./ Indisipliner	Wisuda	Aktif			Jumlah
			UKSW	Boston	USA	
2013	23	9	6	0	2	40
2014	18	3	4	0	0	25
2015	5	0	25	0	0	30
2016	1	0	26	3	0	30
2017	0	0	30	0	0	30
TOTAL	**47**	**12**	**91**	**3**	**2**	**155**

Sumber: DISDIKBUD Kota Jayapura (Diakses 2 Januari 2020)

Namun demikian, Tabel 4.4 di atas juga mengungkapkan bahwa jumlah mahasiswa D.O / indisipliner mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2016. Data ini memberikan informasi bahwa derajat perubahan yang diinginkan tidak hanya berlandaskan pada amanat UU Otsus semata, melainkan juga pada pencapaian studi mahasiswa yang mendapatkan pemberian beasiswa. Total mahasiswa yang telah diwisuda dari tahun 2013 hingga tahun 2017 adalah sebanyak 12 orang. Dari data lima tahun terakhir tersebut sesungguhnya belum tampak derajat perubahan yang diinginkan, karena jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan total 155 mahasiswa yang mendapatkan pemberian beasiswa ini.

Derajat perubahan yang diinginkan juga dilihat dari masa depan karier dan kontribusi mereka yang sudah diwisuda bagi pembangunan di Tanah Papua. Dari hasil wawancara dengan Wali Kota Jayapura memang sudah ada beberapa lulusan UKSW Salatiga yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura:

> *"Ya… sudah ada beberapa anak-anak yang kembali dan sudah kita tempatkan di dinas-dinas di Pemerintah Kota dan membantu Pemerintah Kota. Ya mereka ada lapangan pekerjaan bagi mereka." (BTM., Rabu, 22 Januari 2020 Jam 14 WP)*

Sementara hasil wawancara dengan mahasiswa UKSW Salatiga Angkatan Tahun 2017 juga menuturkan bahwa sepengetahuan mereka sudah ada beberapa lulusan UKSW Salatiga yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura:

> *"Untuk kakak-kakak yang sudah selesai kuliah itu ada yang bekerja membantu untuk dana desa, ada yang menjadi guru honorer, ada juga yang bekerja di Bank swasta." (AT, Sabtu, 22 Februari 2020)*

> *"Yang saya tahu, ada yang bekerja membantu menjalankan program wali kota. Dalam pertemuan dengan bapak wali kota, disampaikan bahwa kami akan mengabdi kembali dalam jangka waktu beberapa tahun." (CSW, Sabtu, 22 Februari 2020)*

> *"Kalo yang saya ketahui kakak-kakak yang telah menyelesaikan studi, mereka telah membantu di pemerintah kampong dan ada juga yang*

mengikuti rekrutmen BUMN (bekerja di Bank).” (FIP, Sabtu, 22 Februari 2020)

Namun sebagian mahasiswa lainnya menuturkan ketidaktahuan mereka mengenai mereka yang sudah lulus. Hanya sedikit yang mengetahui lulusan yang bekerja di perusahaan swasta, karena untuk menjadi seorang ASN tentunya harus melalui jalur yang sudah ditentukan. Meskipun sayangnya ternyata ada yang mendapatkan pekerjaan dan kariernya tidak sesuai dengan bidang studi yang ditempuh.

“Yang saya tahu, ada beberapa kakak-kakak yang sudah lulus pertamanya mereka pulang tidak mendapatkan kejelasan untuk bekerja, jadi mereka harus lobi pekerjaan lagi, agar dapat pekerjaan. Dan saya tidak tahu banyak hal juga tentang kakak-kakak yang sudah selesai kuliah apakah mereka kerja atau tidak.” (FEM, Sabtu, 22 Februari 2020).

“… Tapi lebih banyak yang melenceng dari jurusan kuliah yang mereka ambil.” (AT, Sabtu, 22 Februari 2020)

“Kalau sesuai dengan program ini sudah diberitahukan bahwa kalau sudah lulus maka akan bekerja di lingkungan Kota Jayapura, tapi selama ini belum berjalan baik dan masih ada yang sudah lulus masih belum dapat pekerjaan.” (CRN, Sabtu, 22 Februari 2020)

“Ada yang bantu di kampung asalnya dan yang ambil keguruan mengajar di sekolah, sebagian besar masih bekerja di lingkungan kota, tapi untuk jadi CPNS online dan bukan kota yang merekrut jadi kalau untuk PNS saya rasa tidak.” (LMI, Sabtu, 22 Februari 2020)

“Bagi para mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan, kami diberikan dua pilihan. Pertama, ingin melanjutkan ke S2 dan yang kedua ingin mengabdi dan bekerja di Tanah Tabi (Port Numbay) dan yang dikerjakan / diseleksi.” (OMR, Sabtu, 22 Februari 2020)

Dalam konteks kebijakan, derajat perubahan yang diinginkan belum cukup kuat ataupun memadai.

“Hasilnya masih kurang karena yang wisuda tidak terlalu banyak.” (ALI, Sabtu, 22 Februari 2020)

“Belum mencapai hasil apapun dan masih dalam tahap demi tahap.” (ZTA, Sabtu, 22 Februari 2020)

Derajat perubahan yang diinginkan merupakan harapan yang perlu ditindaklanjuti dan diwujudkan, sebagaimana yang juga menjadi harapan para mahasiswa PKP3N yang masih menjalani kuliah di UKSW Salatiga maupun para calon rekrutmen di masa yang akan datang.

“Bagi para mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan, kami diberikan dua pilihan. Pertama, ingin melanjutkan ke S2 dan yang kedua ingin mengabdi dan bekerja di Tanah Tabi (Port Numbay) dan yang dikerjakan / diseleksi.” (OMR, Sabtu, 22 Februari 2020)

“Pada awalnya, kami sudah dijanjikan lapangan kerja di Papua.” (NAM, Sabtu, 22 Februari 2020)

Hasil pengumpulan data ini dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kota Jayapura, karena sebagian mahasiswa PKP3N menggantungkan harapannya untuk mendapatkan pekerjaan dan jaminan karier di masa depan setelah menyelesaikan pendidikan.

> *"Menurut saya perhatian pemerintah kurang bagi mereka yang sudah menyelesaikan studi, karena yang saya tahu setelah menyelesaikan studi dan pulang ke Jayapura, mereka dibiarkan selama berbulan-bulan (nganggur) sebelum akhirnya ditindaklanjuti untuk pekerjaan dan lanjut studi." (MPA, Sabtu, 22 Februari 2020)*

> *"Menurut saya, sebagai penerima, melihat situasi yang ada di sini saya belum bisa mengatakan "sangat baik". Karena mahasiswa yang sudah lulus dengan yang seharusnya sudah lulus masih berbanding terbalik. Saya pikir perlu ada pemantauan serius dari Pemerintah mengenai hasil studi anak setiap semester. Kemudian, setiap mahasiswa yang sudah lulus benar-benar bisa kembali melayani di Kota Jayapura sehingga beasiswa ini menjadi sia-sia bagi pemerintah Kota." (NFR, Sabtu, 22 Februari 2020)*

> *"Menurut saya, memang harus kembali bekerja di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Karena pemerintah akan rugi jika kita nanti bekerja di tempat lain. Karena pendidikan yang kami dapat sebelum bekerja dibiayai oleh pemerintah Kota Jayapura." (MM, Sabtu, 22 Februari 2020)*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dalam konteks kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus Bidang Pendidikan Tinggi masih kurang atau lemah, antara lain dilihat dari kurangnya keyakinan para mahasiswa PKP3N saat ini terhadap jaminan pekerjaan dan karier masa depan, masih sedikitnya wisudawan penerima PKP3N dibandingkan total mahasiswa yang ada, dan kurangnya informasi tentang bagaimana kontribusi para wisudawan tersebut pada pembangunan di Tanah Papua selama ini. Rendahnya derajat perubahan yang diinginkan ini akan berdampak pada kurangnya keyakinan publik akan konten kebijakan itu sendiri (yang apabila didukung oleh kurang kuatnya unsur konten yang lain) akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan di masa yang akan datang.

Dalam menerjemahkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama khususnya dalam hal ini PKP3N (Program Khusus Putra-Putri Port Numbay) yang digagas oleh Pemerintah Kota Jayapura, maka tentunya membutuhkan peran aktif dari seluruh ASN di instansi terkait terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Peran dan kedudukan pelaksana program sekaligus untuk memastikan bahwa pemberian pemberian beasiswa melalui PKP3N oleh Pemerintah Kota Jayapura dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan pada hasil wawancara tidak terstruktur dengan para pejabat dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Dengan didasarkan akan hasil wawancara para pejabat dan staf dilingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemda Kota Jayapura serta hasil wawancara akurat yang diperoleh dari perwakilan mahasiswa PKP3N Kota Jayapura Angkatan 2017 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Provinsi Jawa Tengah, maka kami beranalisis Ditingkat Konseptor Pejabat Pemda di lingkungan Kota Jayapura telah melakukan suatu terobosan yang baik dalam upaya meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia, namun upaya ini perlu didukung oleh semua stekholder secara

permanen sehingga program Avermasi lokal Port Numbay ini dapat bertahan dalam waktu yang relative lama

Pejabat dan staf teknis dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang ditempatkan dalam menangani program Avermasi PKP3N harus selektif koknitif secara rasio dan prosedural. Jika program PKP3N asal Kota Jayapura dapat bertahan dalam waktu relatif lama, maka lima (5) hal penting yang perlu diperhatikan Pemda Kota Jayapura akan sebuah pelayanan Pendidikan Tinggi, sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi yang bersifat konstruktif akan kelangsungan program PKP3N Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Program ini membutuhkan transparansi yang benar-benar pro mahasiswa dan pro rakyat Port Numbay,
2. Harus ada tim seleksi yang prosedural,
3. Harus ada orang tua asrama yang jelas,
4. Harus ada ASN yang ditempatkan untuk bisa memberikan analisis sebelum dan sesudah terjadinya problema yang dapat mengganggu program PKP3N pemerintah Kota Jayapura,
5. Pejabat yang bekerja di bagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura yang ditempatkan mengurus program PKP3N dinilai lambat meresponi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa.

Sumber daya yang dikerahkan atau dilibatkan dalam kebijakan pemberian beasiswa Dana Otsus di bidang Pendidikan Tinggi mencakup sumber daya manusia, informasi, otoritas, fasilitas dan keuangan (Edwards III, 1980). Sumber daya keuangan (anggaran) merupakan unsur paling penting dan dominan dalam pemberian beasiswa ini. Maka tidak mengherankan apabila unsur ini menjadi penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam UU Otsus disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah pusat menganggarkan penerimaan khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Namun pada tahun 2009, Seknas Fitra dan ICS Papua menyatakan bahwa hanya sekitar 15,49% (Rp 31,52 miliar) dari dana pendidikan yang disediakan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, sementara sisanya salah sasaran.

Kebijakan di bidang pendidikan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait dengan penggunaan Dana Otsus, karena adanya tafsiran yang berbeda mengenai pembangunan pendidikan yang dimaksud. Biaya-biaya untuk menunjang pendidikan ini nyatanya hampir sama hingga lebih besar daripada kepentingan untuk pendidikan itu sendiri. Jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura untuk mahasiswa PKP3N dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahun, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4 Data Anggaran Mahasiswa Penerima PKP3N

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
2013	775.000.000	775.000.000
2014	2.500.452.000	2.500.452.000
2015	3.503.556.000	3.503.556.000

2016	5.863.000.000	5.863.000.000
2017	6.166.113.840	6.166.113.840
Total	**18.808.121.840**	**18.808.121.840**

Sumber: PEMKOT Jayapura (Diakses pada 2020)

Selain anggaran, sumber daya manusia memiliki kedudukan yang penting dalam rangka terlaksananya implementasi kebijakan. Suatu program yang berimplikasi positif sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas SDM. Kondisi ini yang banyak dialami oleh berbagai pelayanan publik di seluruh Indonesia, termasuk di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. PKP3N (Program Khusus Putra-Putri Port Numbay) merupakan salah satu program afirmasi di bidang pendidikan yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Dengan demikian, sebanyak 61 orang ASN (Aparat Sipil Negeri) memiliki peran dan kedudukan untuk mengawasi program PK3PN ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kedudukan Pemerintah Kota Jayapura sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan memegang peranan penting dan paling mendasar dalam penggunaan sumber daya khususnya anggaran yang berasal dari Dana Otsus. Implementasi kebijakan pemberian beasiswa yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Tinggi selama ini banyak menjadi perdebatan pada jenis manfaat yang dihasilkan dan derajat perubahan yang diinginkan. Memang jenis manfaat dan derajat perubahan yang diharapkan sebagai amanat UU Otsus. Namun tanpa adanya penguatan di kedua unsur ini akan menimbulkan keraguan dan menurunkan keyakinan publik terkait dengan penggunaan Dana Otsus.

Sumber daya yang dikerahkan seharusnya transparan. Kedudukan pembuat kebijakan tidak dapat secara langsung mengerahkan sumber daya sebelum memperjelas dan meyakinkan tentang hasil manfaat dan derajat perubahan yang diinginkan. Ini menjadi tantangan Pemerintah ke depan. Jenis manfaat yang dihasilkan dan derajat perubahan yang diinginkan masih akan tampak samar bagi para pihak yang kepentingannya terpengaruh. Oleh karena itu, kedudukan dari pelaksana program menjadi sangat strategis. Pelayanan yang tidak cepat dan tepat, transparan dan akuntabel akan menurunkan kepercayaan publik. Paling tidak, dengan adanya pelayanan yang mengedepankan prinsip *good governance*, publik masih memiliki pertimbangan lain bahwa pemberian beasiswa dalam batas yang wajar. Pihak yang kepentingannya terpengaruh pada akhirnya akan menjadi penentu dari ukuran keberhasilan implementasi kebijakan.

3.2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Dana Otonomi bagi Mahasiswa Port Numbay

3.2.1. Faktor-Faktor Pendukung

Hal lain yang menjadi faktor pendukung program PKP3N Kota Jayapura yang hingga kini masih menjadi eksis adalah faktor UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Proinsi Papua. Hal ini menjadi embrio pemicu keputusan memproteksi anak-anak asli Port Numbay dalam keberadaan hidup di Tanah Tabi. Dari manfaat khusus UU Otsus dimaksud, pemerintah Kota Jayapura dimasa kepemimpinan Walikota Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. menyambut leg spesial

UU 21 tentang Otonomi Khusus Papua tersebut dengan membuat peraturan Walikota dan menterjemahkannya dengan memberikan perhatian di berbagai bidang pembangunan, salah satunya adalah di bidang pendidikan tinggi dengan melakukan kerjasama dengan pihak UKSW sejak tahun 2013 hingga saat ini. Bentuk perhatian yang dibuat pemerintah Kota Jayapura lewat kepemimpinan Walikota Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. adalah tidak lain membangun Sarana dan Prasarana Belajara di UKSW.

Sejak program PKP3N di laksanakan sejak tahun 2013 lalu oleh Walikota Jayapura Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dalam kepemimpinannya di jilid pertama, program pemberian bantuan beasiswa telah menjadi komitmen yang ingin digulirkan secara gratis kepada semua anak-anak Port Numbay, yang ingin melanjutkan studinya di Universitas Satya Wacana (UKSW) Salatiga Provinsi Jawa Tengah.

Di Universitas Kristen Satya Wacana, (UKSW) Salatiga Provinsi Jawa tengah, semua mahasiswa Port Numbay tidak hanya diberikan biaya studi melainkan diberikan juga fasilitas belajar seperti Asrama Putra dan Putri Port Numbay yang beralamat di Jln.Panorama no.17 & 57 di bangun Mega dengan konstruksi bangunan beton berlantai dua.

Dengan demikian, jika mengacu pada UU Otsus No.21 pasal 56 ayatnya yang kedua, maka ada tiga hal penting yang menjadi pemicu terhambatnya penerapan program Afermasi pendidikan tinggi yang dilakukan Pemda Kota Jayapura, adalah Kurangnya Sumber Daya Manusia, Pemda Kota Jayapura masih memaknai Otsus dalam konteks kedaerahan, dan Pemda Kota Jayapura belum menterjemahkan Otsus dalam Tren kebijakan Nasional.

3.2.2. Faktor-Faktor Penghambat

Ada terdapat sebelas (11) Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Bidang Pendidikan Tinggi di lingkungan pemerintah Kota Jayapura yang telah diformulasi dari 19 pertanyaan dan jawaban beragam, yang dikemukakan oleh adik-adik mahasiswa angkatan 2017 , adalah sebagai berikut;

1. Program Ini Membutuhkan Transparansi Yang Benar-Benar Pro Mahasiswa Dan Pro Rakyat Port Numbay,
2. Harus Ada Tim Seleksi Yang Prosedural,
3. Harus Ada Orang Tua Asrama Yang Jelas,
4. Harus Ada ASN Yang Ditempatkan Untuk Bisa Memberikan Analisis Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Problema Yang Dapat Mengganggu Program PKP3N Pemerintah Kota Jayapura,
5. Pejabat Yang Ditempat Di Bagian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Jayapura Yang Ditempatkan Mengurus Program PKP3N Dinilai Lambat Meresponi Berbagai Aspirasi Yang Disampaikan Oleh Adik-Adik Mahasiswa.
6. Sumber Daya Manusia, (SDM) Yang Masih Kurang
7. Masih Memaknai Otsus Dalam Konteks Kedaerahan
8. Terlena Dengan Eforia UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua
9. Belum Memaknai Otsus Dalam Trend Kebijakan Nasional
10. Tidak Dilakukannya Formulasi-Formulasi Baru Terhadap Undang-Undang Otsus Papua Secara Berkesinambungan (Tidak Merubah Tetapi Bisa Menambahkan)
11. Dihidupkan Kembali Tim Asistensi Otsus Papua untuk mengontrol seluruh proses pembangunan yang dikerjakan diseluruh Tanah Papua.

Asrama Putra dan Putri Port Numbay yang beralamat di Jln.Panorama no.17 & 57 di bangun Mega dengan konstruksi bangunan beton berlantai dua. Asrama ini dulunya tampak mega dan mewan, namun seiring berjalannya waktu sudah tidak lagi di urus seperti awal mulanya. Sungguh sangat ironis jika hal ini terus diabaikan maka dapat diduga mempengaruhi hasil studi para mahasiswa yang ingin cepat menyelesaikan studinya. Sarana asrama hendaknya selalu diawasi dan dikontrol oleh pejabat pemerintah kota yang ditugaskan khusus untuk menangani aset-aset PEMDA Kota Jayapura. Oleh karena itu kita berharap kedepan, program ini dapat dipertahankan dan dapat diawasi oleh setiap pejabat pemerintah kota yang bertanggung jawab.

faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberian beasiswa Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Kesimpulan ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan penelitian yang kedua. Mengadaptasi model Grindle (1980:11) dan dikombinasikan dengan model Edwards III (1980), ada lima faktor determinan atau penentu implementasi kebijakan yaitu struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi implementor.

4. Kesimpulan

Program beasiswa dari anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan telah digulirkan Pemerintah Kota Jayapura sejak tahun 2013. Program Khusus Putra-Putri Port Numbay (PKP3N) hingga saat ini telah mendapatkan banyak tantangan dan hambatan dikarenakan kurang jelasnya unsur hasil manfaat yang dihasilkan dan derajat perubahan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemberian beasiswa melalui PKP3N utamanya adalah sumber dana dan fasilitas yang memadai serta otoritas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan yang paling dominan adalah kurangnya disposisi implementor dan dukungan publik yang termasuk di dalamnya para pejabat eksekutif, OPD teknis, tokoh masyarakat.

Penelitian ini memiliki implikasi terhadap Pemerintah Kota Jayapura yang mengimplementasikan kebijakan publik. Implementor menganggap bahwa Pemerintah Kota Jayapura adalah satu-satunya penanggung jawab kebijakan dari pemanfaatan Dana Otsus untuk kepentingan bersama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah tatanan proses dalam mengimplementasikan kebijakan dengan lebih giat menanamkan pola pikir para pemangku kepentingan tentang hasil kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang makna dari kebijakan program itu sendiri.

Hasil riset ini merekomendasikan untuk menjalin komunikasi yang transparan dengan melibatkan pihak gereja, pihak adat dan komponen masyarakat Port Numbay lainnya secara khusus dan melibatkan pihak akademisi Uncen untuk memformulasikan kebijakan baru yang dipandang lebih tepat dan berimplikasi posistif terhadap upaya peningkatan SDM anak-anak Port Numbay asal Kota Jayapura melalui program Program Khusus Putra-putri Port Numbay, (PKP3N), sehingga secara berkesinambungan tercipta SDM anak-anak Port Numbay asal Kota Jayapura yang berkualitas di atas tanahnya sendiri, Tanah Tabi dan SDM yang sama juga dapat di pakai diseluruh tanah Papua serta Indonesia pada umumnya, maka diharapkan kedepan

Kota Jayapura menjadi kota Industri SDM bagi provinsi Papua dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Daftar Pustaka

Apyaka, I. (2016). *Pola Interaksi Sosial (Studi Kasus Pola Interaksi Mahasiswa Papua di Universitas Kristen Satya Wacana)* [Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana]. Repositori Institusi UKSW. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/12725

Asi, Y. V. (2016). *Hubungan antara Hardiness dan Dukungan Sosial Teman dengan Stres Akulturatif pada Mahasiswa Papua Berdasarkan Jenis Kelamin di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga* [Tesis Dipublikasikan, Universitas Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/13230

Dharapos.com. (2018). *Mahasiswa Port Numbay Puji Program PKP3N di UKSW Salatiga*. Dharapos Papua. https://www.dharapospapua.com/2018/01/mahasiswa-port-numbay-puji-program.html

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.

Humas Setda Kota Jayapura. (27 Maret 2017). LMA PORT NUMBAY APRESIASI PROGRAM BEASISWA PKP3N. http://www.jayapurakota.go.id/LMA-PORT-NUMBAY-APRESIASI-PROGRAM-BEASISWA-PKP3N_berita177.html

Humas Setda Kota Jayapura. (19 Oktober 2017). INI TIGA SARJANA PROGRAM PKP3N YANG DIWISUDA UKSW SALATIGA. http://www.jayapurakota.go.id/ini_tiga_sarjana_program_pkpn_yang_diwisuda_uksw_salatiga_berita534.html

Kapisa, A. E. (2014). *Analisis Interaksi Pola Belajar Mahasiswa Papua UKSW Salatiga dengan Menggunakan Social Network Analysis: Studi Kasus Mahasiswa Papua di FTI – UKSW* [Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/12171

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Ke-21). PT Remaja Rosdakarya.

Mustikawaty, V. N. (2016). *Persepsi Warga Kemiri terhadap Mahasiswa Asal Papua di Kota Salatiga: Studi Deskriptif tentang Persepsi Warga terhadap Sikap dan Perilaku Mahasiswa Asal Papua di Kemiri dalam Konteks Komunikasi antar Budaya* [Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/11695

Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Kontemporer* (Edisi Keenam, Cetakan Ke-2). Elex Media Komputindo.

Pattinama, N. W. (2017). *Hubungan Pola Asuh Otoritatif dan Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa Papua di Universitas Kristen Satya Wacana* Universitas

Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/13166

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Ramandey, F. B., Keagop, P. W., & Ireeuw, L. (2005). *Profil Otonomi Khusus Papua*. Aliansi Jurnalis Independen Papua.

Saflessa, S. (2016). *Pengaruh Konsep Diri dan Self Regulated Learning terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Papua yang Mengikuti Program P5 (Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua) Asli Kabupaten Jayapura di UKSW* Universitas Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/10221

Sibi, R. J. L. (2018). *THE CHALLENGES FACED BY PAPUAN PKP3N STUDENTS IN BILINGUAL EDUCATION-LIKE-PROGRAM AT LTC UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA* [Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/18615

Silo, A. (2011). Educational Policy Strategy Under The Papua Special Autonomy Framework. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 18*(1), 63-73.

Soumilena, J. R. L. (2017). *Hubungan antara Konsep Diri dengan Stres Akademik pada Mahasiswa Papua Pengguna Alkohol di Universitas Kristen Satya Wacana* [Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/13111

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.

Tumonggi, A. (2017). *Interaksi dan Adaptasi Sosial Pelajar Papua: Studi Kasus Pelajar Asal Papua di SMA Kristen Satya Wacana dan SMA Theresiana Kota Salatiga* [Skripsi Tidak Dipublikasikan, Universitas Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/16339

Utomo, W. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Yulianti, K. C. (2019). *Hubungan Dukungan Sosial dengan Adaptasi Sosiokultural Mahasiswa Etnis Papua di Universitas Kristen Satya Wacana* [Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana]. Salatiga. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20626